



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH di SEMARANG, cq WALIKOTA SEMARANG di SEMARANG, cq KEPALA DINAS KEBERSIHAN Dan PERTAMANAN KOTA SEMARANG selaku PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Supriyadi Nomor 30 Kota Semarang, yang diwakili oleh Drs Ulfi Imran Basuki, M.Si., selaku Kepala Dinas Kebersihan Dan Petamanan Kota Semarang;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH di SEMARANG, cq WALIKOTA SEMARANG di SEMARANG, selaku KEPALA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG** yang berwenang mengajukan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) atau APBD Perubahan, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, yang diwakili oleh Hendrar Prihadi, SE., M.M., selaku Walikota semarang;
3. **CAMAT TUGU**, selaku Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Km 10, Kota Semarang, yang diwakili oleh HM. Yenuarso, SIP., M.M., selaku Camat Tugu;
4. **CAMAT NGALIYAN**, selaku Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. DR. Hamka Nomor 234 Kota Semarang, yang diwakili oleh Heroe Soekendar, selaku Camat Kalian, kesemuanya dalam hal ini

Halaman 1 dari 27 Hal. Put. Nomor 3028 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Abdul Haris, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014 dan tanggal 22 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**RIDWAN PANGESTU, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Villa Ngaliyan Permai I Blok E/4, RT.003/RW.004, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, selaku penanggung jawab usaha CV Tugu Jaya Sakti, berkedudukan di Jalan Walisongo Km 9 Nomor 99, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Simon Cahyadi Supranata, S.H., M.H., Sp.N., Advokat, berkantor di Jalan Brotojoyo Raya Nomor 6 (Pondok Indraprasta) Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2000 yang lalu, Penggugat atas dasar kepercayaan telah ditunjuk secara langsung (tanpa lelang/tender) sebagai rekanan oleh Tergugat I untuk melaksanakan pekerjaan perawatan atau pemeliharaan kendaraan operasional dan/atau kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Semarang yang dikuasai dan dimanfaatkan Tergugat I sebagai sarana pelaksanaan tugas sehari-hari dan pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara perbaikan (service) kerusakan, ganti onderdil atau *spare part* atau suku cadang, ganti olie atau *doorsmeer*, *inventen* atau olie pelumas, filter solar, isi ulang air accu, cuci dan macam-macam pekerjaan lain untuk kepentingan pemeliharaan kendaraan operasional tersebut;
2. Bahwa kerja sama yang telah dilangsungkan atas dasar saling percaya tersebut dalam praktek penyelenggaraannya dilakukan dengan cara para

Halaman 2 dari 27 Hal. Put. Nomor 3028 K/Pdt/2016



driver atau sopirnya Tergugat I atau sopir dari salah satu Turut Tergugat yang merasa ada kerusakan pada kendaraan yang di stirnya langsung diserahkan kepada karyawan Penggugat di tempat usaha Penggugat untuk dilakukan pekerjaan service sesuai dengan jenis kerusakan atau kebutuhan pada kendaraan operasional milik Pemerintah Kota Semarang yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk keperluan tugas atau dinas Tergugat I dan surat perintah kerja atau DO, ada yang sudah ada tetapi ada banyak juga yang masih DO sementara dari salah satu Turut Tergugat;

3. Bahwa oleh karena pekerjaan perawatan atau pemeliharaan kendaraan operasional dan/atau kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Semarang yang dikuasai dan dimanfaatkan Tergugat I tersebut tidak bisa dipastikan terlebih dahulu apa jenis kerusakan atau apa yang dibutuhkan dan kapan waktu pastinya dikerjakan Penggugat sebagai rekanan maka praktek penyelenggaraannya adalah setiap kali ada kerusakan langsung diperbaiki Penggugat setelah diserahkan tugasnya Tergugat I atau petugas dari salah satu Turut Tergugat dan kalau membutuhkan olie langsung saja diganti oleh Penggugat dan kalau jumlah biayanya sudah mendekati Rp50 juta, Penggugat baru minta pembayarannya kepada Tergugat I dan untuk kepentingan pembayaran tersebut, Tergugat I mengurus penandatanganan Surat Perintah Kerja atau DO, Surat Penawaran, Pakta Integritas, Surat Perjanjian Kerja atau SPK, Surat Berita Acara Penerimaan Barang, Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Negosiasi, Surat Permintaan Penawaran Barang, Tabel Penerimaan Barang atau GD3, Tabel Daftar Barang dan naskah dari surat-surat tersebut semuanya disediakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran;
4. Bahwa kalau tagihannya sudah mendekati jumlah Rp50.000.000,00 barulah surat-surat tersebut dalam posita 3 di atas ditandatangani terlebih dahulu oleh masing-masing petugas atau pejabatnya Tergugat I dan apabila dokumen-dokumen tersebut sudah ditandatangani semuanya oleh pejabat yang berwenang dan/atau Penggugat barulah minta pembayaran pada bagian bendahara atau bagian keuangannya Tergugat I. Akibatnya tanggal surat penagihan Penggugat kerap lebih dahulu dari surat order dan surat-surat lainnya yang telah disebut pada bagian posita 3 tersebut di atas. Kejanggalaan tanggal dari surat-surat tersebut tidak pernah dipermasalahkan karena semua pekerjaan yang dimaksud dalam surat gugat ini sudah berlangsung atas dasar saling percaya dan saling pengertian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua tagihan Penggugat sepanjang tahun 2000-2009 telah dibayar sebagaimana mestinya oleh Tergugat I sesuai dengan mekanisme tersebut dalam posita 3 dan 4 surat gugat ini, sedangkan tagihan-tagihan tersebut di bawah ini tidak dibayar oleh Tergugat I berdasarkan alasan anggarannya sudah habis atau anggarannya tidak ada, dan anehnya Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan-tagihan Penggugat yang belum dibayar tersebut dimasukan sebagai bahan penyusunan Perda Tentang APBD atau APBD perubahan pemerintah Kota Semarang, padahal beberapa tahun sebelumnya, terutama selama kurun waktu kepemimpinan bapak A. Yudi Mardiyana sebagai Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang, setiap tagihan Penggugat senantiasa dibayar karena beliau selalu mengusulkan anggarannya melalui APBD atau APBD perubahan Pemerintah Kota Semarang;
6. Bahwa tagihan-tagihan Penggugat yang tidak dibayar dan/atau terlambat dibayar Tergugat I sampai pada saat surat gugat ini didaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang jumlahnya Rp795.618.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

NO	NO DO / SPK	TGL DO / SPK	NOPOL	NOMINAL	SUB TOTAL	KET
1	024/3036	16-5-2011	D 65 P	Rp45.805.000	Rp45.805.000	Suku Cadang
2	024/2747	3-5-2011	WA 100	Rp44.900.000	Rp44.900.000	Suku Cadang
3	024/3363	28-2-2011	D 65 P	Rp36.200.000	Rp36.200.000	Suku Cadang
4	024/3373	29-4-2011	H 9589 HA	Rp10.120.000		Suku Cadang
5	024/3371	28-6-2011	H 9561 QA	Rp5.457.500		Suku Cadang
6	024/3756	29-4-2011	H 9561 QA	Rp5.570.000		Suku Cadang
					Rp21.147.500	
7	024/3370	27-6-2011	TEREX	Rp30.465.000	Rp30.465.000	Suku Cadang
8	024/3365	4-4-2011	D 65 P	Rp41.070.000	Rp41.070.000	Suku Cadang
9	024/1588	5-1-2011	H 9589 HA	Rp6.670.000		Suku Cadang
10	024/1415	13-1-2011	H 9593 HA	Rp18.720.000		Suku Cadang
					Rp25.390.000	
11	024/3038	30-5-2011	PC 100	Rp36.465.000	Rp36.465.000	Suku Cadang

Halaman 4 dari 27 Hal. Put. Nomor 3028 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	024/2744	11-4-2011	D 65 P	Rp3.090.000		Suku Cadang
13	024/2746	30-5-2011	D 57 P	Rp30.615.000		Suku Cadang
					Rp33.705.000	
14	024/3361	24-1-2011	H 9561 QA	Rp4.855.000		Suku Cadang
15	024/3357	2-2-2011	H 9585 KA	Rp2.105.000		Suku Cadang
16	024/3359	3-3-2011	H 9589 HA	Rp3.970.000		Suku Cadang
17	024/3368	24-3-2011	H 9561 QA	Rp3.916.000		Suku Cadang
18	024/3362	6-4-2011	H 9585 KA	Rp4.912.500		Suku Cadang
19	024/2742	27-4-2011	H 9593 HA	Rp3.970.000		Suku Cadang
20	024/2743	23-5-2011	H 9588 US	Rp3.970.000		Suku Cadang
21	024/2748	25-5-2011	H 9561 QA	Rp2.700.000		Suku Cadang
22	024/3375	8-7-2011	H 9585 KA	Rp3.970.000		Suku Cadang
					Rp34.368.500	
23	024/3035	23-5-2011	D 65 P	Rp6.690.000		Suku Cadang
24	024/3037	30-5-2011	WA 100	Rp27.615.000		Suku Cadang
					Rp44.305.000	
25	024/2749	20-5-2011	H 9592 JS	Rp32.460.000	Rp32.460.000	Suku Cadang
26	024/3364	4-4-2011	D 65 P	Rp30.820.000	Rp30.820.000	Suku Cadang
27	024/3372	2 -7-2011	PC 100	Rp39.610.000	Rp39.610.000	Suku Cadang
28	024/3358	1-2-2011	H 920 HH/WA 100	Rp4.385.000		Suku Cadang
29	024/3623	23-5-2011	D 65 P	Rp11.690.000		Suku Cadang
30	024/3360	21-1-2011	D 57 P	Rp23.105.000		Suku Cadang
					Rp39.180.000	
31	024/3369	25- 3-2011	TEREX	Rp5.385.000	Rp5.385.000	Suku Cadang
32	024/3366	4-4-2011	PC 100	Rp38.855.000	Rp38.855.000	Suku Cadang
33	024/2745	30-5-2011	D 65 P	Rp48.720.000	Rp48.720.000	Suku Cadang
34	024/3374	7-6-2011	D 65 P	Rp 41.385.000	Rp41.385.000	Suku Cadang
35	024/3367	4-4-2011	PC 100	Rp32.785.000	Rp32.785.000	Doorsmeer
36	024/2662	23-2-2011	H 9561 QA	Rp335.000		Doorsmeer
37	024/2666	22-3-2011	H 9561 QA	Rp335.000		Doorsmeer
38	024/2665	22-3-2011	H 9593 HA	Rp335.000		Doorsmeer
39	024/2667	22-3-2011	H 9588 US	Rp335.000		Doorsmeer
40	024/2668	22-3-2011	H 9589 HA	Rp335.000		Doorsmeer

Halaman 5 dari 27 Hal. Put. Nomor 3028 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	024/2658	20-4-2011	H 9589 HA	Rp1.931.250		Doorsmeer
42	024/2657	20-4-2011	H 9561 QA	Rp1.881.250		Doorsmeer
43	024/2656	20-4-2011	H 9588 US	Rp1.881.250		Doorsmeer
44	024/2655	20-4-2011	H 9593 HA	Rp1.881.250		Doorsmeer
45	024/2646	20-4-2011	H 9585 KA	Rp335.000		Doorsmeer
46	024/2647	18-5-2011	H 9561 QA	Rp335.000		Doorsmeer
47	024/2650	18-5-2011	H 9588 US	Rp335.000		Doorsmeer
48	024/3676	16-6-2011	PC 100	Rp1.240.000		Doorsmeer
49	024/3701	16-6-2011	D 65 P	Rp11.030.000		Doorsmeer
50	024/3704	16-6-2011	Mesin Las	Rp130.000		Doorsmeer
51	024/3677	16-6-2011	WA 100	Rp1.875.000		Doorsmeer
52	024/3678	16-6-2011	D 57 P	Rp10.120.000		Doorsmeer
53	024/3491	15-6-2011	H 9645 RS	Rp65.000		Doorsmeer
54	024/3575	18-6-2011	WA 100	Rp2.425.000		Doorsmeer
55	024/2648	18-5-2011	H 9593 HA	Rp335.000		Doorsmeer
56	024/2649	18-5-2011	H 9585 HA	Rp335.000		Doorsmeer
57	024/2842	24-3-2011	H 9592 JS	Rp1.861.250		Doorsmeer
58	024/3799	20-5-2011	H 9592 JS	Rp1.861.250		Doorsmeer
59	024/3497	15-6-2011	H 9593 HA	Rp335.000		Doorsmeer
60	024/3495	15-6-2011	H 9589 HA	Rp335.000		Doorsmeer
61	024/3698	20-7-2011	H 9593 HA	Rp335.000		Doorsmeer
62	024/3699	20-7-2011	H 9589 HA	Rp335.000		Doorsmeer
					Rp42.872.500	
63	024/2661	23-2-2011	H 9589 HA	Rp335.000		Doorsmeer
64	024/2664	23-2-2011	H 9593 HA	Rp335.000		Doorsmeer
65	024/2663	23-2-2011	H 9588 US	Rp335.000		Doorsmeer
66	024/2669	20-1-2011	H 9561 QA	Rp335.000		Doorsmeer
67	024/2672	20-1-2011	H 9588 US	Rp335.000		Doorsmeer
68	024/2660	20-4-2011	PC 100	Rp1.240.000		Doorsmeer
69	024/2659	20-4-2011	D 65 P	Rp10.172.500		Doorsmeer
70	024/3034	23-3-2011	WA 100	Rp737.500		Doorsmeer
					Rp13.825.000	
71	024/2670	20-1-2011	H 9589 HA	Rp335.000		Doorsmeer
72	024/2671	20-1-2011	H 9593 HA	Rp335.000		Doorsmeer
73	024/1927	21-10-2010	H 9585 KA	Rp1.843.250		Doorsmeer
74	024/607	20-10-2010	H 9589 HA	Rp335.000		Doorsmeer
75	024/1919	24-11- 2010	H 9593 HA	Rp335.000		Doorsmeer
76	024/608	20-10-2010	H 9561 QA	Rp335.000		Doorsmeer
77	024/602	23-9-2010	Mesin Las	Rp130.000		Doorsmeer
78	024/603	22-9-2010	H 920 HH	Rp1.387.500		Doorsmeer
79	024/1468	20-10-2010	H 9593 HA	Rp335.000		Doorsmeer
80	024/1355	20-10-2010	H 9588 US	Rp335.000		Doorsmeer





81	024/1917	24-11-2010	H 9588 US	Rp335.000		Doorsmeer
82	024/1916	24-11-2010	H 9589 HA	Rp335.000		Doorsmeer
83	024/1918	24-11-2010	H 9561 QA	Rp335.000		Doorsmeer
84	024/625	22-9-2010	H 9592 JS	Rp1.276.250		Doorsmeer
85	024/2652	24-11-2010	PC 100	Rp3.840.000		Doorsmeer
86	024/2653	24-11-2010	D 57 P	Rp5.367.500		Doorsmeer
87	024/2654	24-11-2010	D 65 P	Rp4.297.500		Doorsmeer
88	024/1383	23-9-2010	D 65 P	Rp5.825.000		Doorsmeer
89	024/1926	21-10-2010	WA 100	Rp1.337.500		Doorsmeer
90	024/1737	22-12-2010	H 9589 HA	Rp1.811.250		Doorsmeer
91	024/1738	22-12-2010	H 9561 QA	Rp1.811.250		Doorsmeer
92	024/1739	22-1-2010	H 9593 HA	Rp1.811.250		Doorsmeer
93	024/1505	2-12-2010	H 9588 US	Rp1.811.750		Doorsmeer
					Rp35.900.000	

7. Bahwa oleh karena tagihan-tagihan tersebut berasal dari pekerjaan-pekerjaan sah yang diberikan Tergugat I secara langsung atau melalui Para Turut Tergugat bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama Tergugat I kepada Penggugat sebagai rekanan yang belum dibayar sampai pada saat surat gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Semarang maka sangat beralasan apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat I selaku Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang agar semua tagihan Penggugat sejumlah Rp795.618.500,00 ( tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dapat diusulkan kepada Tergugat II untuk dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran Pemerintah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 181 *juncto* Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
8. Bahwa oleh karena semua kendaraan operasional/dinas yang perawatan rutinnya dikerjakan Penggugat merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Semarang maka Tergugat II, menurut Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk ikut bertanggung jawab membayar sampai lunas tagihan-tagihan Penggugat tersebut dan karenanya patut diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menggunakan kewenangan yang ada padanya agar tagihan-tagihan Penggugat dapat dibayar dari uang kas Pemerintah Daerah Kota Semarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa supaya tagihan-tagihan Penggugat dapat dibayar dari uang kas Pemerintah Daerah Kota Semarang maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan-tagihan Penggugat yang belum dibayar tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa supaya Para Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum ingkar janji kepada rekanan lain dikemudian hari atau supaya tidak ada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah meniru perbuatan seperti yang dilakukan Tergugat I dalam perkara ini maka mohon juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat dengan hukuman denda atau bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat sejumlah Rp795.618.500,00 ( tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu limaratus rupiah) yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai pada tanggal putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa Penggugat menginginkan tanggal 1 Januari 2012 sebagai tanggal awal perhitungan denda/bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan berdasarkan pertimbangan bahwa semua hasil pekerjaan yang belum dibayar tersebut masuk dalam tahun anggaran Pemerintah Kota Semarang periode 2010-2011;
12. Bahwa tahun anggaran 2010-2011 saat ini sudah lewat, maka dengan belum terbayarnya tagihan-tagihan Penggugat oleh Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang sudah menjadi bukti bahwa unsur keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah sudah terpenuhi;
13. Bahwa tuntutan hukuman denda atau bunga sebesar 3% (tiga persen) tersebut selain berdasarkan pertimbangan hukum keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 33

Halaman 8 dari 27 Hal. Put. Nomor 3028 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah juga berdasarkan alasan-alasan:

- Bahwa untuk membiaya pekerjaan Tergugat I yang nilainya sejumlah Rp795.618.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) tersebut, Penggugat telah menggunakan fasilitas kredit dari bank yang angsuran pengembaliannya, baik pokok maupun bunga-bunganya tetap harus dibayar Penggugat setiap bulan meskipun tagihan-tagihan kepada Tergugat I belum dibayar sebagaimana mestinya oleh Tergugat I;
  - Keterlambatan Tergugat I mengusahakan pembayaran tagihan-tagihan Penggugat melalui dana APBD Kota Semarang sudah menimbulkan kerugian meteril Penggugat, yaitu kehilangan biaya operasional usaha bengkel milik Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai sekarang dan kehilangan kesempatan untuk menikmati keuntungan dari hasil kerja yang telah diberikan secara sah oleh Tergugat I dan telah dikerjakan secara sah pula oleh Penggugat;
14. Mohon pula kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat I agar hukuman denda/bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat sejumlah Rp795.618.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) tersebut yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai pada tanggal putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diusulkan kepada Tergugat II untuk dimasukan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan juga kepada Tergugat II untuk mengajukan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tersebut kepada Turut Tergugat I untuk memperoleh persetujuan bersama;
15. Bahwa oleh karena tagihan-tagihan Penggugat dalam perkara ini tidak dibayar hanya karena kealpaan dan/atau kesalahan Tergugat I yang tidak mengusulkan kepada Tergugat II untuk dimasukan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang 2010-2011 maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menyatakan

Halaman 9 dari 27 Hal. Put. Nomor 3028 K/Pdt/2016



putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

16. Bahwa supaya putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan mengikat Tergugat I dan II untuk melaksanakannya maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai putusan atas perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan II;

17. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberi surat somasi kepada Tergugat II untuk membayar utang tersebut pada tanggal 23 Juni 2014 yang dijawab oleh Tergugat I melalui surat pada bulan September 2014 yang menerangkan bahwa sedang melakukan inventarisasi dan evaluasi data-data tagihan Penggugat dan kuasa hukum Penggugat telah bermusyawarah secara langsung dengan bagian hukum Pemerintah Kota Semarang dan keputusannya adalah minta agar masalah tagihan yang dimaksud dalam perkara *a quo* harus diselesaikan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang dengan alasan Pemerintah Kota Semarang sangat membutuhkan dasar hukum/payung hukum untuk membayar tagihan-tagihan milik Penggugat yang dimaksud dalam perkara *a quo*, sebab berdasarkan hukum keuangan pemerintah daerah, tagihan-tagihan Penggugat tersebut seharusnya sudah dibayar dari dana APBD Pemerintah Kota Semarang periode Tahun Anggaran 2010-2011 atau selambat-lambatnya tahun anggaran 2011-2012. Keterlambatan pembayaran tagihan Penggugat tersebut tidak diatur dalam hukum keuangan daerah dan karenanya pemerintah Kota Semarang sangat membutuhkan produk hukum/payung hukum dari pengadilan untuk membayar tagihan-tagihan tersebut;

18. Bahwa berdasarkan pemberitahuan lisan tersebut maka gugatan perkara ini didaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang telah berutang uang kepada Penggugat sejumlah Rp795.618.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
3. Menyatakan utang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp795.618.500,0 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga atau denda sebagai hukuman sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai pada tanggal putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai utang Pemerintah Kota Semarang dan karenanya harus dibayar dari uang APBD atau APBD perubahan Pemerintah Kota Semarang;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi untuk membayar tagihan-tagihan Penggugat sejumlah Rp795.618.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan Penggugat ditambah bunga/denda tersebut dapat dimasukan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai putusan atas perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan II;
8. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
- II. Subsider:
  - Mohon putusan lain yang dipandang pantas dan adil;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

Halaman 11 dari 27 Hal. Put. Nomor 3028 K/Pdt/2016



Bahwa gugatan Penggugat perihal wanprestasi adalah tidak jelas atau kabur karena tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa dan memutus perkara ini;

2. Gugatan Penggugat Terlalu Dini:

Bahwa dalam gugatan Penggugat perihal wanprestasi namun tidak didasarkan adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban yang dituangkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa yang sah untuk ditagihkan kepada Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat jelas gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan terlalu dini sehingga layak gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 446/Pdt.G/2014/PN Smg., tanggal 18 Agustus 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang telah berutang uang tagihan pembayaran pekerjaan sejumlah Rp.795.618.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (*wanprestasi*) untuk membayar tagihan-tagihan Penggugat sejumlah Rp795.618.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar 6 (enam) persen setahun dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2014 hingga putusan ini dilaksanakan, yang harus dibayar dari uang APBD atau APBD Perubahan Pemerintah Kota Semarang;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tagihan Penggugat ditambah denda tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp1.891.000,0 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT SMG., tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding, masing-masing pada tanggal 4 Mei 2016 dan tanggal 2 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2014 dan tanggal 22 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 446/Pdt.G/2014/PN Smg., *juncto* Nomor 33/Pdt.K/2016/PN Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 Juni 2016, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Hal. Put. Nomor 3028 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai benar tidaknya antara Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) dan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Tergugat) telah terjadi perikatan karena perjanjian secara lisan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan dan perbaikan bak container angkut sampah milik Pemerintah Kota Semarang;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan pada halaman 18 paragraf 4 s/d halaman 19, Majelis *Judex Facti* menyatakan bahwa:

- Menimbang bahwa mencermati peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim perjanjian yang telah berjalan sejak tahun 2000 hingga sekarang adalah merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta;
- Menimbang bahwa oleh karena perjanjian tersebut harus dinyatakan sah maka menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti mengikat, harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan dan apabila dilanggar maka diartikan telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji dan diberikan sanksi atau hukuman;
- Menimbang bahwa terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan, tidaklah menjadikan perjanjian tersebut menjadi tidak sah, oleh karena dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sahnya suatu perjanjian tidaklah disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis, sehingga oleh karenanya perjanjian secara lisanpun merupakan suatu perjanjian yang sah;
- Menimbang bahwa dengan demikian maka Penggugat telah dapat membuktikan salah satu dalil dalam posita gugatannya, yaitu antara Penggugat dengan Para tergugat telah terjadi perikatan yang bersumber dari perjanjian pemborongan pekerjaan dan perjanjian tersebut sebagai perjanjian yang sah, sehingga mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, Para Pemohon Kasasi beranggapan, Majelis tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya berkaitan dengan sah tidaknya perjanjian antara Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) dengan Para Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar terhadap syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:

Halaman 14 dari 27 Hal. Put. Nomor 3028 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;
2. Bahwa empat unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdato merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, artinya apabila salah satu saja unsur syarat sahnya tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi tidak sah;
3. Bahwa tidak ternyata, Majelis Hakim mempertimbangkan terpenuhinya seluruh unsur perjanjian (empat unsur), tetapi hanya salah satu unsur saja yang dipertimbangkan, yaitu unsur kesepakatan (unsur pertama) dari perjanjian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* pada tingkat pertama telah tidak cermat dalam mempertimbangkan hukumnya yang berakibat pada salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu* semestinya mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur perjanjian sebelum menyatakan/menyimpulkan sah tidaknya perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/Para Tergugat) dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat).
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato, salah satu unsur penting dalam perjanjian adalah unsur suatu sebab yang halal;
6. Bahwa menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, (Bandung, Citra Aditia Bakti, 2000, halaman 232) dinyatakan, mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur adanya suatu sebab yang halal, kata *causa* berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang itu ialah "isi perjanjian

Halaman 15 dari 27 Hal. Put. Nomor 3028 K/Pdt/2016



itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

7. Bahwa perjanjian pemborongan *in casu* dilihat dari substansinya baru bisa terjadi dan terlaksana apabila terpenuhi prosedur formalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga meskipun secara substansi pekerjaan pemborongan bukanlah sesuatu yang dilarang, akan tetapi khusus pekerjaan pemborongan yang berasal dari Pemerintah harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Bahwa dengan demikian suatu sebab yang halal sebagai salah satu unsur perjanjian tidak hanya dilihat dari substansi perjanjian, tetapi harus pula dilihat apakah substansi perjanjian memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa perjanjian pemborongan sebagaimana yang menjadi persengketaan dalam perkara *in casu* adalah suatu perjanjian khusus yang tidak hanya tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara saja tetapi juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan keuangan negara/daerah dan mengatur tentang pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintahan;
10. Bahwa dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah, perjanjian yang dibuat oleh penyelenggara negara *in casu* Walikota Semarang beserta jajaran di bawahnya, terikat pada ketentuan peraturan perundang yang berlaku;
11. Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Para Pemohon Kasasi terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Halaman 17 dari 27 Hal. Put. Nomor 3028 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Halaman 18 dari 27 Hal. Put. Nomor 3028 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 18) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan:  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
13. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;
14. Bahwa Pemohon Kasasi I adalah Pengguna Anggaran dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang yang dalam mengadakan pengerjaan pemborongan menggunakan pembiayaan yang bersumber pada APBD Kota Semarang;
15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:
  - 1) Swakelola; dan/atau
  - 2) pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
16. Bahwa dalam pengerjaan pemborongan *in casu*, Pemohon Kasasi I melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan pemilihan penyedia barang/jasa;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
  - b. Penunjukan Langsung;



- c. Pengadaan Langsung; atau
  - d. Kontes/Sayembara.
18. Bahwa dalam hal dilakukan penunjukan langsung, maka sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
- a. Keadaan tertentu; dan/atau
  - b. Pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
19. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
20. Bahwa terhadap kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menurut Pasal 38 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
- 1) Pertahanan negara;
  - 2) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - 3) Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
    - a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
    - b) Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
    - c) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;
21. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kontrak kerja dalam pengadaan barang/jasa, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor



54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- 1) Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
- 2) Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
- 3) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan;
- 4) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan;

22. Bahwa perjanjian kerja yang dibuat antara Pemerintah dengan penyedia barang/jasa harus dibuktikan dengan bukti tertulis. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menetapkan adanya tanda bukti perjanjian;

23. Bahwa Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:

Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

- 1) bukti pembelian;
- 2) kuitansi;
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK);
- 4) Surat Perjanjian;

24. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditegaskan:

- 1) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



25. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan, setiap perjanjian kerja yang dibuat antara pemberi kerja dan penerima kerja harus dibuktikan dengan tanda bukti perjanjian;
26. Bahwa tidak ternyata dalam persidangan bisa dibuktikan adanya tanda bukti perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik berupa bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) ataupun surat perjanjian sesuai dengan kualifikasi nilai pengerjaan pemborongan;
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pengelolaan keuangan negara/daerah khususnya berkaitan dengan pengadaan barang/jasa haruslah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. Efisien**  
Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - b. Efektif**  
Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  - c. Transparan**  
Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
  - d. Terbuka**  
Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
  - e. Bersaing**  
Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga



dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. Adil tidak diskriminatif

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

g. Akuntabel

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

28. Bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;
29. Bahwa salah satu prinsip dalam proses pengadaan barang/jasa adalah Akuntabel, yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka setiap perjanjian yang dibuat haruslah memenuhi prinsip akuntabilitas sebagaimana tersebut;
30. Bahwa salah satu bukti suatu perjanjian dikatakan akuntabel apabila perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan dan ketentuan in casu berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
31. Bahwa salah satu aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perjanjian pengadaan barang/jasa adalah adanya tanda bukti perjanjian baik berupa bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) ataupun surat perjanjian sesuai dengan kualifikasi nilai pengerjaan pemborongan;
32. Bahwa Pemohon Kasasi I selaku Pengguna Anggaran tunduk pada aturan dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pemohon Kasasi I tidak akan mencairkan dana/anggaran yang bersumber dari APBD Kota Semarang tanpa adanya kelengkapan administrasi dan prosedur pencairan;
33. Bahwa dengan demikian, kesepakatan lisan dalam perjanjian





pengadaan barang/jasa belum dapat dianggap telah terjadi perjanjian tanpa disertai dengan tanda bukti perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

34. Bahwa oleh karena dalam perkara *in casu*, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya tanda bukti perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik berupa bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) ataupun surat perjanjian sesuai dengan kualifikasi nilai pengerjaan pemborongan, maka dengan demikian harus dianggap antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi tidak pernah terjadi kesepakatan perjanjian pengadaan barang/jasa (pemborongan pekerjaan perbaikan container sampah);
  35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dapat dibuktikan jika Majelis Hakim *Judex Facti* tidak ternyata telah cermat dalam mempertimbangkan hukumnya;
  36. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dapat dibuktikan jika Majelis Hakim *Judex Facti* ternyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  37. Bahwa oleh karena majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka putusan Pengadilan *Judex Facti* pada tingkat pertama dan tingkat banding haruslah dibatalkan;
  38. Bahwa oleh karena maka putusan Pengadilan *Judex Facti* pada tingkat pertama dan tingkat banding dianggap batal, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menerima Permohonan Kasasi ini dan menyatakan batal putusan Pengadilan *Judex Facti* pada tingkat pertama dan tingkat banding haruslah dibatalkan;
2. Mengenai benar tidaknya Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Tergugat) telah wanprestasi tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) tersebut;  
Bahwa wanprestasi adalah ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian;  
Bahwa oleh karena dalam perkara *in casu* menurut pendapat Pemohon



Kasasi I, tidak pernah ada bukti formal yang membuktikan telah terjadi perjanjian pemborongan pekerjaan antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi, maka tidaklah mungkin Pemohon Kasasi melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat);

Bahwa dengan demikian, tidak dilakukannya pembayaran oleh Pemohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) bukan karena wanprestasi, tapi semata-mata karena tidak terpenuhinya syarat formal dalam perjanjian pekerjaan pemborongan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena benar sebagai atasan Para Tergugat bertanggung jawab terhadap perintah lisan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pegawainya/bawahannya terhadap pihak lain (penyedia jasa/Penggugat) sedangkan terhadap perintah tersebut pihak atasan mengetahuinya tetapi tidak melarang penyedia jasa/Penggugat untuk menyediakan jasa perbaikan, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara a quo, yaitu bahwa secara berulang-ulang sejak tahun 2000 Para Supir/bawahan Para Tergugat secara lisan memerintah Penggugat untuk melakukan berbagai perbaikan terhadap mobil dinas kebersihan milik Tergugat I, perintah mana telah dilaksanakan oleh Penggugat, dan atas perintah tersebut Para Tergugat mengetahuinya tetapi tidak mengeluarkan peringatan atau pemberitahuan mengenai sah/tidak sahnya perintah tersebut kepada Penggugat, sehingga telah benar bahwa Para Tergugat sepatutnya membayar biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI**



**JAWA TENGAH di SEMARANG, cq WALIKOTA SEMARANG di SEMARANG, cq KEPALA DINAS KEBERSIHAN Dan PERTAMANAN KOTA SEMARANG selaku PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH di SEMARANG, cq WALIKOTA SEMARANG di SEMARANG, cq KEPALA DINAS KEBERSIHAN Dan PERTAMANAN KOTA SEMARANG selaku PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH di SEMARANG, cq WALIKOTA SEMARANG di SEMARANG, selaku KEPALA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG, 3. CAMAT TUGU, 4. CAMAT NGALIYAN, tersebut;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat-Para Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	Rp489.000,00
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)